BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Pembalakan Liar
Edisi : 07 Mei 2008
Halaman : A3

Kasus Pembalakan Liar Riau Dibawa ke KPK

"Proses hukum di kepolisian terlalu lamban."

JAKARTA -- Kepolisian Daerah Riau telah membawa sebagian kasus pembalakan liar ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyidik dari dua institusi berbeda ini sudah membahas hal ini dua hari lalu.

"Untuk melihat apakah ada dugaan korupsi atau tidak," kata Johan kemarin. Kasus yang dibahas itu, menurut Johan, terjadi di beberapa kabupaten berbeda. "Dari data yang masuk, ada 1,2 juta hektare area hutan yang digunduli dan ditelantarkan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto memang mengatakan kasus pembalakan liar di Riau sebagian ditangani KPK. Adapun yang ditangani di Polda Riau, menurut Sutanto, proses hukumnya sedang berjalan.

Dua hari lalu, kata Johan, Komisi sudah mengundang Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi ke Komisi untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Sutjiptadi memaparkan hambatan dalam penanganan pembalakan liar di Riau.

Menurut salinan dokumen yang diperoleh *Tempo* kemarin, disebutkan Polda Riau melimpahkan kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin area hutan tanaman industri 1,7 juta hektare di Riau ke Komisi. Dalam dokumen bertanggal 4 Mei lalu itu disebutkan kayu di area hutan telah digunduli.

Hingga kini di area itu baru ada realisasi HTI seluas 657 ribu hektare, sisanya ditelantarkan. Karena itu, polisi menduga si pemilik izin hanya mengambil kayu alamnya. Sebab, izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu telah terbit pada 1996-2008.

Salinan dokumen juga menyebutkan polisi mendapat laporan dari sejumlah anggota masyarakat. Namun, warga memohon agar Polda melimpahkan kasus pembalakan liar ke Komisi. Sejauh ini Komisi baru menangani satu kasus dari Riau, yakni kasus yang membuat Bupati Pelalawan Azmun Jaafar ditetapkan sebagai tersangka. Namun, tak satu pun polisi di Riau yang mau menjelaskan lebih jauh soal ini. Kepala Polda Riau Brigjen Sutjiptadi tak bisa dihubungi hingga tadi malam. Gubernur Riau Rusli Zainal juga tak bisa dikontak.

Juru bicara pemerintah Riau, Riszki, menolak berkomentar. "No comment, maaf saya sedang di Jakarta. Saya belum tahu," katanya saat dihubungi Tempo.

Secara terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau Johny S. Mundung mengatakan pelimpahan perkara ke KPK telah menimbulkan harapan baru warga Riau. **NURLIS | PURBORINI | JUPERNALIS**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup